

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- H.S, Salim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi) Jilid I*, Djambatan, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2013, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan X*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely University of California Press, 1978, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Penyunting Nurainun Mangunsong), Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno, 1989, *Hukum dan politik Agraria*, Jakarta: Karaunika-Universitas Terbuka
- Perhimpunan Alumni Jerman, 1996, *Seminar Nasional Pemetaan Tanah I Jakarta, 24-25 Juli 1996*, Kantor Menteri Negara Agraria, Jakarta
- Salle, Aminuddin, dkk, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publisng, Makassar
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Sitorus, Oloan, H.M.Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria SW, dkk, 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat (Cetakan Kedua Revisi)*, Gama Press dan FH UGM, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria SW, dkk, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Cetakan VI)*, Kompas, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Cetakan Kedua)*, Kompas, Jakarta

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahid, A.M Yunus, 2014, *Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta

B. Tesis/Laporan Penelitian/Surat Kabar

Ismail, Nurhasan, dkk, “*Penjabaran Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, edisi Juni 2010, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Murtitomo, Satriyo, “*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Penguasaan Tanah di Atas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*”, Program Studi Hukum Agraria, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Kuwado, Fabian Januarius, “*Cegah Sengketa Lahan, Jokowi Minta “One Map Policy” Segera Dibuat*”, Harian Kompas, 24 Agustus 2016

Riyadi, Rakhmat, “*Upaya Penyelesaian Konflik Catchment Area di Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau*”, Magistra, 2014.

Sukayadi, 2011, *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Eks Hak Guna Bangunan PT.Way Halim Permai*, Program Studi Magister Hukum Bidang Konsentrasi Hukum Kenegaraan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sulistiyani, Susy, “*Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Lahan Kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan*”, Program studi Magister Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Sumardjono, Maria SW, “*Sekali Lagi Ikhwal Hak Komunal Atas Tanah*”, Harian Kompas, 19 Juli 2016

Sumardjono, Maria SW, “*Ikhwal Hak Komunal Atas Tanah*”, Harian Kompas, 06 Juli 2015

Sumardjono, Maria SW, “*UUPA Setelah 55 Tahun*”, Harian Kompas, 25 September 2015

Sumardiyana, “*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 PRP Tahun 1990 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dalam Pembatasan batas Minimum Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Bantul*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Wicaksono, Dian Agung, *Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Yusmira, Nova, “*Politik Hukum Perubahan Kawasan Hutan Dalam Upaya Menyelesaikan Perbedaan Peruntukan Ruang Dikawasan Hutan*”, Program studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5432)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan penegasan Batas Desa

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menglhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014
tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Yang Dapat Dikonversi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 045/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 035/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2013/PTUN.TPI

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun
2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: PB.3/Menhut-11/2014,
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PRT/M/2014,
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor:8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang berada di dalam Kawasan Hutan

Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :173/Kpts-II/1986 tentang
Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan
Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 955/Kpts-II/92 tentang Perubahan
Fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 12.950 (dua belas ribu sembilan
ratus lima puluh) hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas \pm
21.750 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) hektar yang terletak di
Kelompok Hutan S.Jago, S.Engkang, S.Anculai, S.Bintan, S.Kangboi, dan
S.Kawal, Pulau Bintan, Kabupaten Daerah Tingkat II Riau, Propinsi Daerah
Tingkat I Riau

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor
Kpts.516/VIII/1992 tentang Penunjukan Catchment Area yang meliputi 5
(lima) Das yaitu Das Jago, Ekang Anculai, Bintan, Kangboi dan Kawal seluas
 \pm 37.000 Ha sebagai Hutan Lindung

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (Seratus dua puluh empat tujuh ratus tujuh puluh lima) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (Delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (Seribu delapan ratus tiga puluh empat) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 207.569 (Dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 60.299 (Enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 (Lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau

Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 354/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Bintan

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan selaku ketua Tim IP4T Nomor 46.1/KEP-21.01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/II/1980 tanggal 24 Nopember 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung,

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 tanggal 08 Agustus 1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi

Surat Edaran Nomor: SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

D. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, “*Bintan Utara Dalam Angka 2014*”, <http://www.bintankab.bps.go.id>, diakses tanggal 29 September 2015.

Rakhmat Riyadi, September 2014, *Upaya Penyelesaian Konflik Catchment Area di Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau*. Magistra. Volume 26, No.89, <http://journal.unwidha.ac.id/index.php/Magistra/article/view/440>, 21 Oktober 2016